

Menatap Politik Muhammadiyah pada Abad Kedua

■ Oleh Yulianingsih

Agustus mendatang, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi massa (ormas) Islam terbesar di Indonesia akan menggelar muktamar ke-47. Ajang musyawarah tertinggi di Muhammadiyah ini akan menghasilkan sejumlah panduan bagi organisasi lima tahun ke depan. Muktamar juga sebagai ajang pergantian kepemimpinan di Muhammadiyah yang menganut sistem kolektif kolegial.

Sebagai organisasi keumatan, semua aspek kehidupan dibahas dalam muktamar tersebut untuk menghasilkan panduan-panduan bagi gerak umat persyarikatan. Salah satu hal yang dibahas dalam muktamar itu adalah aspek politik.

Menurut guru besar sejarah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra, Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Organisasi ini memiliki organisasi sayap dan amal usaha yang cukup banyak di Indonesia.

Dari sisi kesehatan, ratusan rumah sakit telah didirikan organisasi ini. Di bidang pendidikan, ribuan sekolah dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi juga berdiri atas prakarsa Muhammadiyah. Hal sama juga dilakukan di sektor ekonomi, dakwah, dan sosial. Peran serta organisasi ini tidak bisa dikesampingkan dalam kemajuan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Sementara, dalam perpolitikan nasional, Azyumardi yang berbicara dalam seminar pra-Muktamar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), akhir pekan lalu, berpendapat, Muhammadiyah seyogyanya tidak tampil "terlalu

politik" dalam berbagai perkembangan dan dinamika politik nasional.

"Muhammadiyah justru harus banyak tampil sebagai *civil society* dan *interest group*," katanya.

Melalui dua peran itu, menurut Azyumardi, Muhammadiyah bisa sekaligus memerankan dirinya sebagai *pressure group* (kelompok penekan) dan *moral force* (kekuatan moral).

Salah satu faktor keberahanan dan keberhasilan Muhammadiyah sepanjang sejarah dalam menjalankan misinya adalah kemampuan organisasi ini dalam memelihara jarak dengan negara, kekuasaan, dan politik sehari-hari. Muhammadiyah menghindarkan diri dari keterlibatan langsung dalam politik, baik politik negara, politik kepartaian, maupun politik kekuasaan.

Berbeda tidaknya politik Muhammadiyah ke depan jelas akan dipengaruhi hasil muktamar ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus mendatang. Sebab, aktivitas dan gaya personal masing-masing pimpinan Muhammadiyah akan memengaruhi gaya politik Muhammadiyah. Namun, terlepas dari hal itu, kata Azyumardi, hubungan baik dengan kekuasaan merupakan tradisi yang telah lama dan patut dipertahankan Muhammadiyah.

"Dengan berbagai hal tadi maka pilihan terbaik bagi Muhammadiyah ke depan adalah harmoni dan kooperatif dengan kepemimpinan nasional tanpa harus menghilangkan watak dan kepribadian dasarnya sebagai organisasi masyarakat dakwah dan pendidikan serta *civil society*."

Pembantu negara

Dalam forum yang sama, mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif mengatakan, sepanjang pengetahuannya, Muhammadiyah be-